



Yayasan Pendidikan Bung Hatta
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang
E-mail: fpik@bunghatta.ac.id Websie: www.fpik.bunghatta.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4890/SK/FPIK/X-2020

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 105/Kepmen-KP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan, maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suparno, M.Si	Staf Pengajar FPIK

Untuk menjadi Tenaga Ahli bidang Bilogi Laut dalam Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan di Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL PENGGAJIAN SUMBER DAYA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1071);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.
- KESATU : Menetapkan keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang terdiri atas Pakar, Akademisi, dan Pejabat instansi pemerintah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Masa kerja keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini didanai dari
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Tini Mattini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN
SUMBER DAYA IKAN

KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA

A. Pakar

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	INSTITUSI
1.	Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc.	Akustik Perikanan	Institut Pertanian Bogor
2.	Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si., M.Si.	Sosial Ekonomi Perikanan	Universitas Padjadjaran
3.	Dr. Ir. Zairion, M.Sc.	Dinamika Populasi Ikan	Institut Pertanian Bogor
4.	Purwanto, Ph.D	Ekonomi Perikanan	Pakar/Praktisi Perikanan
5.	Purwito Martosubroto, M.Sc., Ph.D	Pengelolaan Perikanan	Pakar/Praktisi Perikanan
6.	Prof. Ir. I Wayan Arthana, M.S., Ph.D	Ekologi Perairan	Universitas Udayana
7.	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc.	Biologi Perikanan	Universitas Hasanudin

B. Akademisi

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	INSTITUSI/ WPPNRI
8.	Prof. Zainal A. Muchlisin, Ph.D	Biologi Perikanan	Universitas Syiah Kuala/ WPPNRI 571
9.	Dr. Suparno, M.Si.	Biologi Laut	Unversitas Bung Hatta/ WPPNRI 572
10.	Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc.	Dinamika Populasi Ikan	Universitas Brawijaya/ WPPNRI 573
11.	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si.	Dinamika Populasi Ikan	Universitas Riau/ WPPNRI 711

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	INSTITUSI/ WPPNRI
12.	Dr. Ir. Suradi Wijaya Saputra, M.S.	Biologi Perikanan	Universitas Diponegoro/ WPPNRI 712
13.	Prof. Dr. Andi Iqbal Burhanuddin, S.T., M.Fish.Sc.	Biologi Laut	Universitas Hasanuddin/ WPPNRI 713
14.	Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., Ph.D	Pengelolaan Perikanan	Universitas Halu Oleo/ WPPNRI 714
15.	Dr. Mutmainnah, S.Pi., M.Si.	Sistem Informasi Geografis	Universitas Khairun/ WPPNRI 715
16.	Dr. Ir. Johnny Budiman, M.Si, M.Sc.	Teknologi/ Kapasitas Penangkapan Ikan	Universitas Sam Ratulangi/ WPPNRI 716
17.	Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.	Pengkajian Stok Ikan	Universitas Papua/ WPPNRI 717
18.	Dr. Ir. Delly D. Paulina Matruty, M.Si.	Pengendalian Penangkapan Ikan	Universitas Pattimura/ WPPNRI 718

C. Pejabat Instansi Pemerintah Terkait

NO	NAMA/JABATAN	BIDANG KEAHLIAN	INSTANSI
19.	Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc.	Pengelolaan Perikanan	Pusat Riset Perikanan, KKP
20.	Dr. Ir. Duto Nugroho, M.Si.	Dinamika Populasi Ikan	Pusat Riset Perikanan, KKP
21.	Dr. Lilis Sadiyah, S.Si.	Statistik Perikanan	Pusat Riset Perikanan, KKP
22.	Dr. Ing. Widodo Setiyo Pranowo, M.Si.	Sistem Informasi Geografis	Pusat Riset Kelautan, KKP
23.	Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.Sc.	Sosial Ekonomi Perikanan	Balai Besar Riset Sosial dan Ekonomi KP, KKP
24.	Dr. Fayakun Satria, S.Pi., M.App.Sc.	Pengkajian Stok Ikan	Balai Riset Perikanan Laut, KKP
25.	Dr. Teja Arief Wibawa, M.Si.	Penginderaan Jauh	Balai Riset dan Observasi laut, KKP

NO	NAMA/JABATAN	BIDANG KEAHLIAN	INSTANSI
26.	Prof. Dr. Sam Wouthuyzen, M.Sc.	Oseanografi	Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI
27.	Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si.	Pengkajian Stok Ikan	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, KKP
28.	Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, DEA	Limnologi	Pusat Limnologi, LIPI
29.	Dr. Dina Muthmainnah, S.Si., M.Si.	Pengelolaan Perikanan	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, KKP
30.	Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si.	Sosial Ekonomi Perikanan	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
31.	Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.	Pengelolaan Perikanan	Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia
32.	Ir. Endroyono, SE, MM	Pengelolaan Perikanan	Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia
33.	Dwi Agus Siswa Putra, SE	Pengelolaan Perikanan	Asosiasi Tuna Longline Indonesia
34.	Ir. Agus A. Budiman, M.Aq	Pengelolaan Perikanan	Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia
35.	Ir. Hengkie R.F. Wowor	Pengelolaan Perikanan	Asosiasi Kapal Perikanan Indonesia

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

EDHY PRABOWO

Tini Martini

